

DAFTAR ISI

Sampul Depan	i
Sampul Dalam.....	ii
Persyaratan Gelar	iii
Pernyataan.....	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	xii
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Istilah.....	xvi
Daftar Singkatan.....	xviii
Daftar Lampiran	xix
Abstrak	xxi
Abstract	xxii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Batasan Dan Ruang Lingkup.....	9
1.5 Tinjauan Pusataka.....	10
1.6 Kerangka Konseptual	12
1.7 Metode Penelitian.....	15
1.8 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II: PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KALIMANTAN BARAT PADA MASA SEBELUM INDONESIA MERDEKA	
2.1 Awal Terbentuknya Pemerintahan Daerah di Kalimantan Barat	19
2.1.1 Pemerintahan Masa Kesultanan Pontianak	19
2.1.2 Pengaruh VOC Pada Pemerintahan Kesultanan Pontianak	23
2.1.3. East India Company (EIC) di Pontianak.....	25
2.1.4 Terbentuknya Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat.....	27
2.1.5 Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat pada Kekuasaan Militer Jepang.....	33
BAB III: PERKEMBANGAN BERDIRINYA PEMERINTAHAN DAERAH KALIMANTAN BARAT SETELAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN	

SAMPAI PENETAPAN OTONOMI DAERAH KALIMANTAN BARAT
TAHUN 1947-1956

3.1 Masa Republik Indonesia 1945-1949.....	45
3.2 Masa Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949-1950.....	59
3.3 Masa Negara Kesatuan RI 1950-1956.....	74
BAB IV: KESIMPULAN	79
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Drs. Nadorst, Sekertaris dari Dewan Penasehat Kalimantan Barat mewujudkan aturan dasar (ketentuan) dari Pontianak. Dalam Konferensi Perundingan dari kiri ke kanan : Lim Bak Meng anggota Degelijks Bestuur van der West Borneo, Oevang Oeray, Sultan Hamid II (Ketua dari Dewan Penasehat Kalimantan Barat)64

Gambar 3.2 Letnan G. G. Dr. H.J. van Mook di kiri, Prof. W. Schermerhorn menandatangani aturan dasar (ketentuan) Kalimantan Barat.64

Gambar 3.3 Sultan Hamid II dari Pontianak menandatangani aturan dasar (ketentuan) Kalimantan Barat.....64

Gambar 3.4 Sidang atau rapat Dewan Penasehat Kalimantan Barat yang pertama dan pelantikan Kepala Daerah yang baru yaitu Sultan Hamid II di Pontianak.65

Gambar 3.5 Pengambilan sumpah jabatan Dewan Penasehat Kalimantan Barat di Pontianak65

DAFTAR ISTILAH

Karisidenan	: Daerah administratif yang dikepalai oleh seorang Residen
Afdelling	: Wilayah administratif yang berada dibawah Karisidenan dan di Kepalai oleh seorang asisten Residen
Standgemeente	: Kota Madya yang dikepali oleh seorang Wali Kota
Residen	: Kepala Karisidenan
Demang	: Kepala Adat
Assisten Residen	: Kepala Afdeeling
Plaatselijk Fonds	: Sistem Pasar
Onderafdeling	: Wilayah Administratif yang di kepalai seorang kontrolir
Decentralisatie Wet 1903	: Undang-Undang Desentralisasi masa Hindia Belanda
Decentralisatie Besluit	: Undang-Undang yang mengemukakan tentang pokok-pokok pembentukan, susunan, kedudukan, dan wewenang dewan dalam pengelolaan keuangan yang dipisahkan dari pemerintah pusat
Local Raden Ordonatie	: Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah pada masa Hindia Belanda
Groepgemeenschap	: Sebuah Daerah Hukum Adat pada masa Hindia Belanda
Gewest	: Provinsi dikepalai seorang Gubernur (<i>Gouverneur</i>)
Hinomaru	: Bendera Jepang
Rikugun	: Angkatan Darat Militer Jepang
Kaigun	: Angkatan Laut Militer Jepang

- Minseibu : Kantor angkatan sipil yang berada langsung dibawah
struktur komando Militer Angkatan Laut Jepang
- Gunseireikan : Pemimpin atau Gubernur Jendral masa Pemerintahan
Militer Jepang
- Gunseikan : Menteri dari Gunseireikan
- Ken Po : Undang-undang masa Pemerintahan Militer Jepang
- Tokubete-Sityoo : Daerah Pemerintahan Pusat pada masa Pemerintahan
Militer Jepang
- Nissinkai : Organisasi Masyarakat di Kalimantan Barat pada
masa Pemerintahan Militer Jepang

DAFTAR SINGKATAN

APRA	: Angkatan Perang Ratu Adil
DIKB	: Daerah Istimewa Kalimantan Barat
DKB	: Daerah Kalimantan Barat
EIC	: <i>East India Company</i>
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat
KND-KB	: Komite Nasional Daerah-Kalimantan Barat
KMB	: Konferensi Meja Bundar
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
RIS	: Republik Indonesia Serikat
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
VOC	: <i>Vereenigde Oostindische Compagnie</i>
RR	: <i>Regeringsreglement</i>
KNIL	: <i>Koninklijk Nederlands-Indisch Leger</i> atau Tentara Kerjaan Hindia Belanda
IS	: <i>Indische Saats Refeling</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Korban Pembantaian Jepang Terhadap Para Pemuka Rakyat Kalimantan Barat	102
Lampiran 2 Salinan Surat Kabar Panji Rakyat Nomor. 51 Tahun ke-2 tentang Rencana Anggaran Dasar Kalimantan Barat untuk menjadi Daerah Istimewa yang mempunyai pemerintahan sendiri dan turut menyusun Negara Indonesia Serikat	105
Lampiran 3 Verslag Borneo West (Laporan Kunjungan Pemerintah Belanda Ke Kalimantan Barat) tanggal 20-27 Mei 1947.....	106
Lampiran 4 Penetapan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1947 tentang Penghapusan Jabatan Gubernur Provinsi-Provinsi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil	107
Lampiran 5 Komunike Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Kalimantan Barat.....	108
Lampiran 6 Penjelasan Komite Nasional Kalimantan Barat	110
Lampiran 7 Keputusan No. 235/R Pemangku Jabatan Kepala Daerah Kalimantan Barat 1950	113
Lampiran 8 Keputusan No. 234/R Badan Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat Dalam Sidangnya Tertanggal 7 Mei Tahun 1950.....	114
Lampiran 9 Mosi Turunan Komite Nasional Kalimantan Barat 1950	115

Lampiran 10 Kementrian Dalam Negeri Perihal Kalimantan Barat 24 Mei 1950	116
Lampiran 11 Kongres Rakyat seKalimantan Barat Pontianak 1 Agustus 1950....	120
Lampiran 12 Kongres Rakyat Kalimantan Barat 2 Agustus 1950	122
Lampiran 13 Kongres Rakyat Kalimantan Barat 2 Agustus 1950	123
Lampiran 14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat No. Pem. 15/5/50.....	124
Lampiran 15 Badan Pertimbangan Pemerintahan Kalimantan Barat 1950.....	126
Lampiran 16 Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur	129
Lampiran 17 Kementrian Dalam Negeri Perihal Pembagian Kalimantan Dalam Tiga Provinsi Otonom 1957	13